

## Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Jepara: Kajian Praktis Melalui Program Magang Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Warno<sup>1</sup>, Evita Ayu Andriyani<sup>2</sup>, Dinda Rahma Antika<sup>3</sup>, Nada Nasywa Shabrina<sup>4</sup>, Putri Rahayu<sup>5</sup>, Zakiyya Zulfa<sup>6</sup>

Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang E-mail :

[evitaayu648@gmail.com](mailto:evitaayu648@gmail.com)

### ABSTRAK

Program magang mahasiswa UIN Walisongo Semarang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara yang memiliki tujuan untuk menghubungkan antara teori akademik dan praktik nyata dalam pengelolaan keuangan daerah, memperdalam pemahaman mahasiswa terkait manajemen keuangan daerah sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi keuangan pemerintah daerah. Selama masa magang, mahasiswa turut berpartisipasi secara langsung dalam berbagai aktivitas, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan surat masuk dan keluar, penginputan data GU dan SP2D, pengarsipan dokumen, serta melakukan rekap kode RUP. Melalui program ini, diharapkan tercipta sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Magang Mahasiswa, Teori dan Praktik, Administrasi Keuangan*

### ABSTRACT

*The student internship program of UIN Walisongo Semarang at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jepara Regency aims to connect academic theory and real practice in regional financial management, deepen students' understanding of regional financial management while contributing to improving the efficiency of local government financial administration. During the internship, students are actively involved in various activities, ranging from planning, implementation, recording, reporting to regional financial accountability. The activities carried out include managing incoming letters, inputting GU and SP2D data, archiving documents, and recapping RUP codes. Through this program, it is hoped that synergy will be created between the academic world and local governments in supporting more effective and efficient development.*

Keywords : *Student Internship, Theory and Practice, Financial Administration*

### PENDAHULUAN

Keuangan merupakan sebuah bidang ilmu dan ketrampilan dalam mengelola uang yang mempengaruhi setiap organisasi, terkait dengan proses, lembaga, pasar, serta instrument yang terlibat dalam aliran uang antar individu, bisnis dan pemerintah (Marimin et al., 2024). Dalam lingkup pemerintahan daerah, keuangan mencakup hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai secara finansial. Hal ini meliputi seluruh aset daerah, baik yang bersifat tetap

maupun tidak tetap, yang dikelola pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang dapat diukur dan dinilai dengan uang (Elsye, 2020).

Indonesia mulai memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah diterbitkannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mengalihkan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ( Difinubun et al., 2023). Pergeseran ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih desentralistik. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah kini memiliki kebebasan dalam mengelola anggaran dan membuat kebijakan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan (Bahasoan et al., 2024).

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kabupaten Jepara turut melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki wewenang penuh untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada demi mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sholikhah & Priyono, 2022). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Jepara dapat secara mandiri mengelola potensi wilayahnya demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu aspek krusial dalam manajemen keuangan daerah adalah pengelolaan aset, yang wajib dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun masyarakat. Aset tersebut meliputi properti dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan lain yang bernilai tinggi serta berperan mendukung pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya memastikan pemanfaatannya secara optimal dan menghindari penurunan nilai yang tidak perlu, tetapi juga mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Pamungkas et al., 2024).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah salah satu instansi yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan dan aset di Kabupaten Jepara. Lembaga ini menjadi bentuk nyata dari penerapan kebijakan otonomi daerah dengan fokus utama pada pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan setiap daerah menjadi hal yang sangat diperhatikan. Penerapan kebijakan ini juga mengubah paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah, yang kini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas (Sabili & Sunaningsih, 2022).

Dalam rangka meningkatkan pemahaman praktis mahasiswa tentang praktik pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam meningkatkan kapasitas manajemen keuangan daerah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjalin kerja sama dengan BPKAD Kabupaten Jepara melalui program magang mahasiswa. Program ini bertujuan sebagai jembatan yang menghubungkan teori akademik dengan praktik langsung di lapangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi penting mengingat adanya

kesenjangan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dan kenyataan di lapangan, terutama dalam menghadapi kompleksitas manajemen keuangan daerah. Melalui magang ini, mahasiswa dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain meningkatkan pemahaman praktis mahasiswa tentang tata kelola keuangan daerah, program ini juga bertujuan membangun kesadaran mahasiswa akan peran mereka di masa depan sebagai calon profesional yang akan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat (Sabrina, 2025).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara berlokasi di Jl. Kartini No.1, Panggang I, Panggang, Kec. Jepara, Jawa Tengah 59411. BPKAD kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 sebagai implementasi dari pasal (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Jepara, BPKAD mengusung visi untuk mewujudkan “Jepara Madani” yang berkarakter, maju, dan memiliki daya saing. Untuk mencapai visi tersebut, BPKAD merumuskan beberapa misi pembangunan Kabupaten Jepara (Jepara, n.d.) :

- a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.
- b. Mengelola sumber daya alam secara seimbang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mandiri dan progresif.
- d. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah.
- e. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menyediakan layanan publik yang profesional.

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, memegang peran penting dalam membantu Bupati dalam menjalankan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan aset daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. Untuk menjalankan tugas tersebut, BPKAD memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya :

1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan layanan publik yang berada dalam cakupan tugasnya.
3. Memberikan pembinaan serta melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya.
4. Mengelola administrasi dinas yang berkaitan dengan tugas pokoknya.
5. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan magang merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Islam Negeri Walisongo dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara. Kegiatan magang ini berlangsung kurang lebih tiga bulan, mulai dari 3 Januari hingga 11 April 2025, dengan sistem lima hari kerja selama seminggu. Pada hari pertama pelaksanaan, peserta magang menerima orientasi mengenai struktur organisasi BPKAD serta penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab di masing-masing unit kerja. Mahasiswa yang mengikuti program magang ditempatkan di empat divisi utama, yakni bagian sekretariat, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang anggaran, serta bidang pendapatan. Penempatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa terkait proses pengelolaan keuangan daerah dan

administrasi, guna memastikan tata kelola keuangan dan aset daerah berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Proses pelaksanaan magang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, sosialisasi dan pembekalan, pelaksanaan magang, monitoring dan evaluasi, serta pembuatan laporan akhir. Tahap pertama adalah persiapan. Tahap ini mencakup proses administratif yang melibatkan pengumpulan dokumen seperti transkrip nilai semester 1-4 dan Curriculum Vitae (CV) dari mahasiswa magang. Setelah administrasi selesai, dilaksanakan sosialisasi yang menjelaskan secara rinci agenda kegiatan magang selama tiga bulan, termasuk alur pelaksanaan dan tugas-tugas yang dikerjakan. Tahap ini diakhiri dengan pembekalan yang mencakup pengarahan teknis, penyampaian tata tertib selama magang, serta materi tentang tugas dan tanggung jawab peserta. Sosialisasi dan pembekalan dilakukan langsung oleh instansi agar proses berjalan tanpa hambatan.

Pada tahap kedua, mahasiswa mulai menjalankan aktivitas magang di unit kerja yang telah ditentukan di BPKAD Jepara. Setiap peserta magang diberikan tugas yang bervariasi sesuai bidang penempatan. Beberapa tugas yang dilakukan meliputi pengelolaan dokumen surat masuk dan keluar, penginputan data dokumen ganti uang (GU), pencatatan nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait transaksi kas masuk dan keluar, pengarsipan surat tanda setoran (STS) dan rekening koran serta melakukan rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Tahap ketiga melibatkan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan untuk mengikuti perkembangan mahasiswa selama menjalani magang. Dosen pembimbing melakukan kunjungan langsung ke tempat magang guna memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mahasiswa berjalan lancar dan sesuai dengan program studi serta kompetensinya. Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui sesi diskusi daring menggunakan platform seperti Zoom, di mana kemajuan tugas, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang bisa diterapkan dibahas bersama.

Tahap terakhir dari kegiatan magang ini adalah penyusunan laporan. Mahasiswa diwajibkan membuat laporan komprehensif yang merangkum seluruh kegiatan selama tiga bulan magang. Selain laporan utama, mahasiswa juga membuat artikel ilmiah yang dapat berupa artikel pengabdian atau penelitian terkait pengalaman magang. Selain itu, peserta juga diwajibkan menyusun buku bunga rampai yang telah memperoleh hak

kekayaan intelektual (HAKI) serta menulis esai yang dipublikasikan di media massa, seperti surat kabar atau platform sejenisnya (Mufida & Abrori, 2024).

## HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program magang yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang dibawah jurusan Akuntansi Syariah merupakan bentuk kerjasama strategis antara universitas dengan BPKAD Kabupaten Jepara. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sekaligus memperdalam pemahaman tentang sistem administrasi pemerintahan yang berlaku. Program ini diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antara dunia akademik dan sektor pemerintahan, guna mendorong pembangunan daerah yang lebih efisien dan efektif.

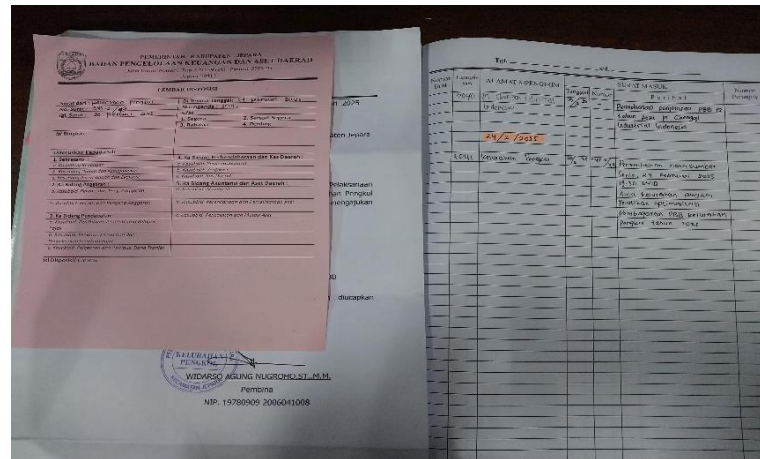
Selama menjalani magang dan pengabdian, mahasiswa menerima dukungan serta pengawasan langsung dari staf yang bertugas di kantor BPKAD Kabupaten Jepara. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memberikan panduan dan arahan kepada mahasiswa terkait tugas yang diberikan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Kegiatan pengabdian tersebut dilaksanakan di kantor BPKAD Kabupaten Jepara.

### *Mengagenda Surat Masuk dan Keluar*

Mahasiswa magang yang ditempatkan di bagian sekretariat (Tata Usaha) bertanggung jawab atas pengelolaan surat masuk dan keluar. Dalam menjalankan tugasnya, peserta magang menerima berbagai dokumen penting yang dikirimkan oleh satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Jepara, seperti surat undangan, permohonan, tembusan, perjanjian kontrak, dan lain sebagainya. Proses pengelolaan surat masuk diawali dengan menempelkan lembar disposisi dipojok kiri atas surat. Lembar disposisi tersebut diisi dengan data penting seperti alamat pengirim, nomor surat, tanggal surat, penerimaan surat, dan nomor agenda. Setelah itu, informasi terkait surat dicatat dalam buku agenda surat masuk yang meliputi alamat pengirim, tanggal dan nomor surat, serta perihal. Khusus untuk surat undangan, data tersebut juga dimasukkan ke dalam database spreadsheet untuk mempermudah pengarsipan dan pencarian. Setelah proses pencatatan selesai, surat diserahkan kepada Kepala BPKAD untuk mendapatkan disposisi. Surat yang telah di disposisikan oleh Kepala BPKAD kemudian diteruskan ke Sekretaris BPKAD untuk mendapatkan arahan lanjutan. Selanjutnya, surat di distribusikan sesuai

bidangnya, seperti bidang sekretariat, anggaran, perbendaharaan, pendapatan, atau akuntansi aset, sesuai dengan isi dan tujuan surat tersebut. Sementara itu, untuk surat keluar, proses pencatatan diawali dengan pemberian nomor surat. Mahasiswa mencatat data surat keluar dalam buku agenda yang memuat informasi seperti tanggal, alamat tujuan, perihal surat, serta kode angka sesuai klasifikasi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen keluar tercatat dengan rapi dan terdokumentasi secara sistematis.

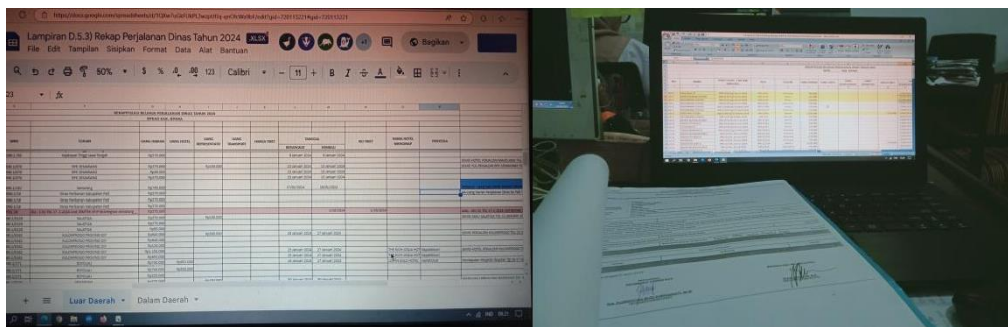




**Gambar 1.** Agenda surat masuk dan keluar

### ***Menginput, Upload Data GU, SP2D dan SPM – SPTMJ – PPK***

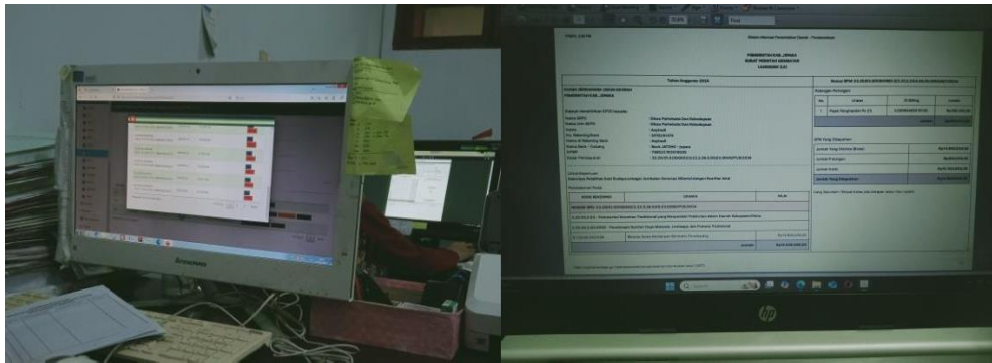
Mahasiswa magang yang ditempatkan dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah ditugaskan untuk membantu mengelola data keuangan, khususnya terkait dokumen Ganti Uang (GU). Mahasiswa magang membantu proses penginputan, pengecekan, dan koreksi data GU menggunakan aplikasi Excel, termasuk rekap belanja bahan bakar minyak (BBM), biaya cetak, serta pengadaan untuk Tahun Anggaran 2024. Data tersebut bersumber dari arsip GU 1 hingga GU 13.



**Gambar 2.** penginputan Data GU

Selain itu, mahasiswa magang juga bertugas mengunggah data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang memuat seluruh laporan transaksi kas masuk dan keluar dari berbagai dinas di Kabupaten Jepara. Dokumen SP2D yang diperoleh

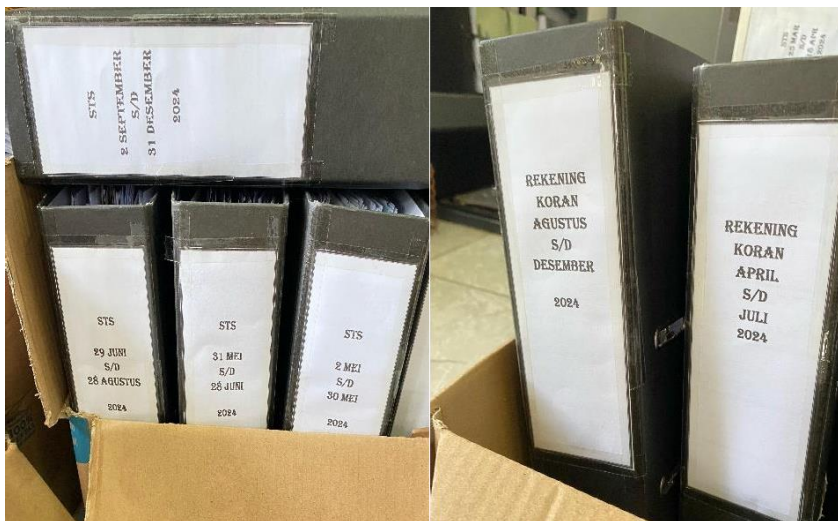
dari Kepala Bidang Perbendaharaan, lalu diunggah ke aplikasi sipd.kemendagri dengan memasukkan informasi penting seperti nomor, tanggal, dan nilai SP2D. Jika ada data yang gagal di unggah, mahasiswa akan menyerahkannya kembali kepada pegawai untuk diperbaiki. (Nisrina & Rian, 2024). Selain mengunggah SP2D, mahasiswa juga membantu dalam mengunggah dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), SPTMJ (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari seluruh dinas di Kabupaten Jepara. Dokumen-dokumen tersebut diambil dari drive Perbendaharaan dan diunggah ke sistem aplikasi SiPeDe.



**Gambar 3.** penginputan data SP2D **Gambar 4.** upload *SPM, SPTMJ, PPK*

### ***Mengarsipkan dokumen***

Mahasiswa magang melakukan kegiatan pengarsipan beberapa dokumen dan surat, seperti surat setoran pajak daerah (SSPD), dokumen surat setoran pajak (STS) serta mutasi atau rekening koran yang dikirim dari bank. SSPD berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pembayaran pajak daerah telah dilakukan dan disetorkan ke kas daerah melalui saluran pembayaran resmi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Sementara itu, STS digunakan sebagai tanda bukti transaksi penyetoran pajak. Setelah diperiksa, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal setoran, dimulai dari yang paling awal hingga akhir. Proses pengarsipan dilakukan dengan melubangi dokumen menggunakan perforator, lalu disimpan dalam ordner dan disusun secara rapi di dalam lemari arsip untuk memudahkan pencarian.

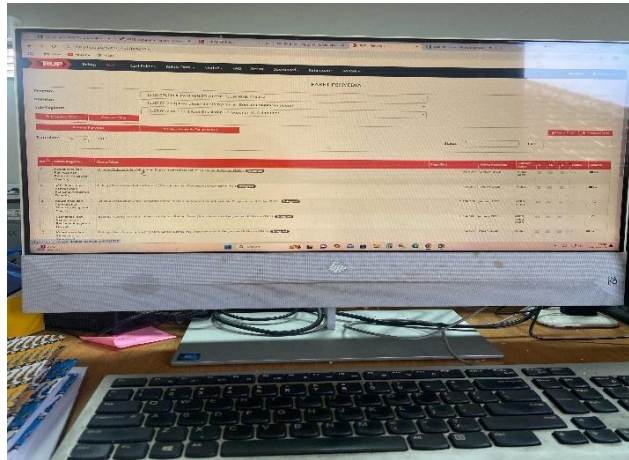


**Gambar 5.** Arsip STS & Rekening Koran

### **Rekapitulasi Kode RUP**

Pada bagian anggaran, mahasiswa magang bertugas membantu proses rekapitulasi Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta menganalisis kegiatan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini mencakup pengecekan dan penginputan data RUP ke dalam sistem, memastikan kecocokan antara kode RUP dan jenis pengadaan yang direncanakan. Selain itu, mahasiswa juga terlibat dalam mengidentifikasi rincian anggaran setiap item pengadaan, termasuk spesifikasi barang, estimasi harga, dan jadwal pelaksanaannya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga berperan dalam memantau realisasi anggaran dengan

membandingkan antara rencana awal dan pelaksanaan aktual, guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.



**Gambar 6.** Rekapitulasi kode RUP

## **KESIMPULAN**

Program magang dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai pada 3 Januari 2025 dan berakhir pada April 2025. Kegiatan ini diadakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara. Proses magang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi dan pembekalan, pelaksanaan magang, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan magang. Program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa agar siap menjadi tenaga profesional yang dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Difinubun, Y., Khaerani, A., & Fajar, U. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v3i1.4372>
- Elsye, R. (2020). *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Alqaprint Jatinangor.Jepara, B. (n.d.). *VISI MISI*. <https://bpkad.jepara.go.id/>
- Marimin, A., Tho'in, M., & Kusuma, I. L. (2024). Manajemen Keuangan dalam Syariaah. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*, 7(1), 181–190.
- Mufida, N. N., & Abrori, R. (2024). Implementasi Peran Mahasiswa Dalam Program MBKM Magang Industri Guna Meningkatkan Kinerja Pada BPKAD Kabupaten Bangkalan. *Journal of Economic Community Service*, 2(2), 70–76.
- Pamungkas, T. S., Helpiastuti, S. B., & Nurqarin, A. S. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap oleh BPKAD Kabupaten Jember. *Contemporary Public Administration Review*, 2(1), 16–32. <https://doi.org/10.26593/copar.v2i1.8321.16-32>
- Sabili, E. H., & Sunaningsih, S. N. (2022). Peran BPKAD Dalam Penyajian Data Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2083–2093. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1379>
- Sabrina, N. N. (2025). *Dari Teori ke Praktik: Belajar Lebih Dalam Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Program Magang di BPKAD Jepara*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nadanasywa1171/679b0abfed64155f5f0c0574/dari-teori-ke-praktik-belajar-lebih-dalam-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah-melalui-program-magang-di-bpkad-jepara>
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.430>